

## TELAAH JURNAL

---

---

Nama : Mar'atus Shalihah

NPM : 2313031025

### Soal:

Berikan pandangan anda tentang isi kedua jurnal di atas, tuliskan argumentasi anda silakan dielaborasi berdasarkan teori dan hasil riset yang relevan.

### Jawaban:

#### 1. Gambaran Umum Kedua Jurnal

Kedua jurnal yang dikaji membahas tema yang saling melengkapi dalam ranah akuntansi aktiva tetap, namun dari sudut pandang berbeda. Jurnal pertama (Handayani, 2013) mengkaji pelaporan aktiva tetap di lingkungan pemerintahan, mengevaluasi kelemahan sistem SIMAK dan mendeskripsikan faktor-faktor paling berpengaruh dalam pelaporan aktiva tetap. Sementara jurnal kedua (Budiman, Pangemanan, & Tangkuman, 2014) meneliti perlakuan akuntansi aktiva tetap pada entitas swasta, yaitu PT. Hasjrat Multifinance Manado, dengan fokus pada kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Keduanya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menemukan kelemahan mendasar dalam praktik akuntansi aktiva tetap di masing-masing konteks. Kajian ini memberikan pandangan kritis terhadap kualitas argumentasi, relevansi teori, dan kelengkapan analisis kedua jurnal tersebut.

#### 2. Analisis Jurnal Pertama: Handayani (2013)

##### A. Kekuatan Argumentasi

Handayani (2013) membangun kerangka evaluasi yang sistematis melalui lima kriteria audit aktiva tetap: *Existency/Validity*, *Completeness*, *Valuation*, *Right & Obligation*, dan *Classification & Disclosure*. Penggunaan kelima asersi manajemen ini selaras dengan literatur audit standar, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Arens, Elder, dan Beasley (2014), di mana kelima asersi tersebut menjadi dasar pengujian substantif atas saldo akun.

Argumen terkuat jurnal ini terletak pada pembahasan valuation, khususnya perbedaan pengakuan antara akuntansi berbasis kas dan akrual. Contoh kasus kendaraan dinas senilai Rp300.000.000 yang dibeli Oktober 2011 tetapi baru dibayar November 2011 secara konkret menunjukkan bagaimana selisih Rp5.000.000 dapat muncul hanya

dari perbedaan titik pengakuan transaksi. Ini merupakan ilustrasi yang efektif dan relevan untuk mendukung urgensi transisi ke PP No. 71 Tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual.

#### **B. Kelemahan dan Celah Argumentasi**

Pertama, metodologi penelitian disajikan terlalu ringkas. Penelitian kualitatif yang andal seharusnya menjelaskan prosedur validitas seperti triangulasi sumber atau member *checking*, namun hal ini tidak tampak dalam laporan Handayani (2013). Kedua, jurnal ini membahas transisi ke akuntansi berbasis akrual sebagai tantangan utama, tetapi tidak menganalisis secara memadai kesiapan kelembagaan pemerintah menghadapi perubahan tersebut. Padahal, riset Harun, Van-Peursem, dan Eggleton (2012) dalam *Journal of Accounting and Organizational Change* menunjukkan bahwa kegagalan implementasi akuntansi akrual di negara berkembang lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan kapasitas SDM dan resistensi budaya birokrasi daripada ketidaksempurnaan sistem teknis. Ketiga, pembahasan mengenai kelemahan SIMAK masih relatif terbatas karena jurnal hanya menyatakan bahwa sistem tersebut “belum mengakomodir keinginan pemeriksa” tanpa merinci dimensi teknis yang bermasalah, sehingga analisis yang diberikan belum sepenuhnya mendalam.

#### **C. Relevansi Teoritis**

Dari perspektif teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), masalah pelaporan aktiva tetap pemerintah merupakan manifestasi dari information asymmetry antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Ketika laporan aktiva tetap tidak mengungkapkan akumulasi penyusutan secara memadai, masyarakat kehilangan kemampuan menilai efisiensi penggunaan aset negara. Handayani (2013) menyentuh dimensi ini secara implisit, namun tidak mengembangkannya secara teoritis, hal tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan argumentasi teoritis yang belum dieksplorasi secara mendalam (terlewatkan). Di sisi lain, semangat transisi ke akuntansi akrual sejalan dengan prinsip *New Public Management* yang menekankan akuntabilitas aset pemerintah layaknya entitas bisnis, meski implementasinya di Indonesia masih terhambat kelemahan SDM dan sistem.

### **3. Analisis Jurnal Kedua: Budiman, Pangemanan, & Tangkuman (2014)**

#### **A. Kekuatan Argumentasi**

Jurnal kedua lebih kaya dalam kajian literatur. Budiman dkk. (2014) mendefinisikan dan membedakan berbagai metode penyusutan, seperti garis lurus, saldo menurun,

jumlah angka tahun, dan metode aktivitas dengan cukup rinci. Pemilihan metode penyusutan bukan keputusan netral; ia berdampak langsung pada besaran laba yang dilaporkan dan nilai aset di neraca.

Temuan bahwa PT. Hasjrat Multifinance tidak memasukkan biaya pengiriman Rp240.750 ke dalam harga perolehan mesin fotocopy adalah contoh konkret ketidaksesuaian dengan PSAK No. 16 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung hingga aset siap digunakan. Meskipun nilai selisih tersebut kecil, kondisi ini menunjukkan belum konsistennya penerapan prosedur kapitalisasi aset tetap dalam perusahaan. Temuan lain yang menarik adalah tidak adanya penghentian aktiva tetap selama 2005–2012, padahal beberapa aset diduga telah habis masa manfaat ekonomisnya. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan nilai aset dalam neraca menjadi overstated sehingga dapat memengaruhi kewajaran informasi mengenai kapasitas produktif perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan.

#### **B. Kelemahan dan Celah Argumentasi**

Pertama, cakupan sampel yang hanya enam transaksi membuat generalisasi temuan menjadi sangat lemah. Penelitian kualitatif sekalipun tetap membutuhkan kedalaman analisis yang tidak dapat dikompensasi dengan penambahan referensi pustaka semata. Kedua, meskipun jurnal menyebut absennya pengujian penurunan nilai aset sebagai pelanggaran PSAK No. 48, tidak ada analisis tentang besaran dampak ekonomisnya. Watts dan Zimmerman (1986) dalam *Positive Accounting Theory* menjelaskan bahwa manajemen pada kondisi tertentu dapat memiliki insentif untuk menunda atau menghindari pengakuan penurunan nilai aset guna mempertahankan kinerja laporan keuangan, dan kondisi serupa kemungkinan dapat terjadi pada perusahaan pembiayaan seperti PT. Hasjrat Multifinance. Ketiga, tidak ada diskusi tentang implikasi perpajakan, padahal perlakuan aktiva tetap secara akuntansi komersial memiliki implikasi langsung terhadap pajak penghasilan badan, dimana ini menjadi dimensi yang krusial bagi perusahaan swasta.

#### **4. Perbandingan Dan Sintesis**

Secara substantif, kedua jurnal menemukan masalah yang pada dasarnya serupa meskipun berada di konteks berbeda: lemahnya pengakuan nilai aset yang akurat, absennya pengungkapan penyusutan yang memadai, dan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan akuntansi aktiva tetap di

Indonesia bersifat struktural dan lintas sektor. World Bank (2010) dalam laporan ROSC: *Accounting & Auditing*, Indonesia mengidentifikasi lemahnya penegakan standar akuntansi sebagai akar masalah utama kualitas laporan keuangan di Indonesia, baik di sektor publik maupun swasta.

**Tabel 1. Matriks Perbandingan Dua Jurnal**

<b>Dimensi</b>	<b>Handayani (2013)</b>	<b>Budiman dkk. (2014)</b>
Konteks	Instansi Pemerintah	Swasta (Perusahaan Pembiayaan)
Fokus Masalah	<i>Valuation &amp; Disclosure</i> penyusutan	Pengakuan harga perolehan & penghentian aset
Standar Acuan	SAP, PP 71/2010	PSAK 16 & PSAK 48
Landasan Teori	<i>Agency Theory, New Public Management</i>	<i>Positive Accounting Theory</i>
Kekuatan	Relevansi kebijakan & contoh kasus konkret	Kajian literatur metodologis lebih lengkap
Kelemahan	Validasi metodologi tipis, kritik SIMAK dangkal	Sampel sempit, absen analisis dampak & pajak

## 5. Argumentasi Penutup

Secara keseluruhan, kedua jurnal memberikan kontribusi deskriptif yang berguna sebagai dokumentasi kelemahan praktik akuntansi aktiva tetap di Indonesia. Namun keduanya berhenti di tataran diagnosis tanpa cukup mengeksplorasi rekomendasi berbasis bukti yang berakar pada teori yang kuat. Terdapat tiga hal yang perlu diperkuat dalam riset sejenis ke depan.

Pertama, integrasi perspektif *behavioral accounting* untuk memahami mengapa aktor dalam organisasi, baik pejabat pemerintah maupun manajemen perusahaan secara konsisten mengabaikan standar yang berlaku. Apakah ini karena *bounded rationality*, insentif yang tidak selaras, atau keterbatasan kompetensi? Kedua, dibutuhkan analisis kuantitatif tentang dampak material dari ketidakpatuhan akuntansi aktiva tetap, misalnya dengan mengukur selisih *book value versus fair value* aset yang tidak disusutkan secara benar. Ketiga, kajian komparatif lintas negara diperlukan mengingat banyak negara berkembang menghadapi

tantangan serupa dalam implementasi akuntansi akrual untuk aset tetap pemerintah. Dengan elaborasi ini, riset akuntansi aktiva tetap tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga dapat menjadi dasar kebijakan yang kokoh untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan, baik di tingkat pemerintahan maupun korporasi di Indonesia.

## REFERENSI

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (15th ed.). Pearson Education.
- Budiman, E., Pangemanan, S., & Tangkuman, S. (2014). Analisis perlakuan akuntansi aktiva tetap pada PT. Hasjrat Multifinance Manado 2012. *Jurnal EMBA*, 2(1), 411–420.
- Handayani, M. (2013). Evaluasi penyajian pelaporan aktiva tetap untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 5(3), 189–196.
- Harun, H., Van-Peursem, K., & Eggleton, I. R. C. (2012). Institutionalization of accrual accounting in the Indonesian public sector. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 8(3), 257–285.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*. Prentice-Hall.